

**PEMBERDAYAAN MASYARAKATA MELALUI PROGRAM DESA WISATA
OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DI DESA MONDU
KECAMATAN KANATANG KABUPATEN SUMBA TIMUR**

Anjastias Lobriandry Heo
NPP. 31.0766

*Asdaf Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*

Email: anjashéo@gmail.com

Nama Pembimbing : Kartiwi, S. Sos., M. Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research is motivated by the tourism potential that is spread throughout Indonesia. The tourism sector is even the third largest contributor to national foreign exchange after exports of palm oil (CPO) and coal. East Sumba is a district in NTT Province which is located on Sumba Island. The East Sumba Regency Government, through the Department of Tourism and Culture, is aggressively increasing tourism activities so that they can be developed by taking into account existing local wisdom values. One type of tourism based on local wisdom is the development of tourist villages. Mondu Village has natural tourist attractions, namely the Tanggedu waterfall and Purrukambera beach. Apart from natural tourism, there is also cultural tourism which is still traditional, namely traditional villages with habits and customs that are still very strong. **Objective:** This research aims to describe and analyze community empowerment through the Tourism Village program in Mondu Village, Kanatang District, East Sumba Regency. **Methods:** The research method used in this research is a descriptive qualitative approach with an inductive approach. Data collection techniques are carried out by means of interviews, observation and documentation, with data analysis carried out through data reduction, data presentation, drawing conclusions. **Results/Findings:** The results of this research are that community empowerment through the tourism village program by the District Tourism and Culture Office in Mondu Village, Kanatang District, East Sumba Regency is quite good in implementing the empowerment program because it is carried out fairly and equally in accordance with community rights. The community is also involved in the management of tourist villages, both in planning, implementation, supervision and evaluation. **Conclusion:** Community involvement has a positive impact on the welfare of their lives. This program also increases the abilities and capacity of the community through the training that has been carried out. **Keywords:** Community Empowerment, Development, Tourism

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi wisata yang tersebar seluruh pelosok Indonesia. Sektor pariwisata bahkan menjadi salah satu penyumbang devisa nasional terbesar ketiga setelah ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan batubara. Sumba Timur adalah kabupaten di Provinsi NTT yang terletak di Pulau Sumba. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan gencar meningkatkan kegiatan pariwisata agar

dapat dikembangkan dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Salah satu pariwisata berbasis kearifan lokal yaitu pengembangan desa wisata. Desa Mondu mempunyai objek wisata alam yaitu air terjun tanggedu dan pantai purrukambera. Selain wisata alam, terdapat juga wisata budaya yang masih tradisional yaitu perkampungan adat dengan kebiasaan dan adat istiadat yang masih sangat kuat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Wisata di Desa Mondu Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini yaitu pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten di Desa Mondu Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur cukup baik dalam pelaksanaan program pemberdayaan dikarenakan dilaksanakan secara adil dan setara sesuai dengan hak-hak masyarakat. Masyarakat juga ikut terlibat dalam pengelolaan desa wisata baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. **Kesimpulan:** Keterlibatan masyarakat memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan hidup mereka. Melalui program ini juga meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan, Pariwisata

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan banyak potensi wisata yang tersebar seluruh pelosok. Sektor pariwisata bahkan menjadi salah satu penyumbang devisa nasional terbesar ketiga setelah ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan batubara. Pengelolaan sektor pariwisata pun terus dikembangkan oleh pemerintah, melalui berbagai kebijakan dilakukan dalam membuat pariwisata Indonesia lebih maju dan dikenal di mata dunia. Melalui mekanisme tarikan dan dorongan terhadap sektor ekonomi lain yang terkait dengan sektor pariwisata, seperti hotel dan restoran, angkutan, industri kerajinan dan lain-lain, dibutuhkan campur tangan masyarakat yang dapat membantu pengelolaan sektor pariwisata tersebut.

Masyarakat yang merupakan salah satu stakeholder (selain pemerintah dan swasta) dalam dunia kepariwisataan berkedudukan sebagai tuan rumah, memiliki sumber daya berupa adat istiadat, tradisi dan budaya untuk menunjang keberlangsungan pariwisata. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan masyarakat memiliki peran yang strategis dalam upaya pengembangan pariwisata di daerah. Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan posisi, potensi dan peran masyarakat baik sebagai subjek atau pelaku maupun penerima manfaat pembangunan, karena dukungan masyarakat turut menentukan keberhasilan jangka panjang pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Dukungan masyarakat dapat diperoleh melalui penanaman kesadaran akan arti penting pengembangan pariwisata.

Desa Mondu merupakan salah satu desa di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi yang sangat banyak dan lebih lengkap dari desa lain. Desa Mondu mempunyai objek wisata alam yaitu air terjun tanggedu dan pantai purrukambera. Selain wisata alam, terdapat juga wisata budaya yang masih tradisional yaitu perkampungan adat dengan kebiasaan dan adat istiadat yang masih sangat kuat. Selain itu, Desa wisata Mondu mendapat prestasi dalam bidang pariwisata yaitu mendapatkan piagam penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Desa wisata binaan Kemenparekraf.

Pengembangan potensi wisata di Desa Mondu perlu langkah-langkah pengelolaan pembangunan yang berbasis masyarakat dan potensi lokal untuk terus menjaga kelestarian potensi yang dimiliki untuk terus dapat dikembangkan. Pengembangan pariwisata di Desa ini harus mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya dan karakteristik daerah serta mengajak partisipasi masyarakat lokal untuk turut membangun serta memberdayakan sumber daya manusia dalam mengelola potensi wisata. Namun, dalam perjalanannya, pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Desa Mondu mengalami beberapa hambatan seperti masalah sarana prasarana, sumber daya manusia yang dimiliki dan anggaran.

Permasalahan yang ada dalam pengembangan Desa Wisata Mondu bisa dilihat yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang belum maksimal seperti minimnya jumlah penginapan, jalan yang baik dan rumah makan. Menurut Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumba Timur dalam wawancara di media TimesIndonesia pada tahun 2020 jalan Desa pada tahun 2020 yang terdapat dalam SK Bupati yang ditetapkan dengan panjang darat 470,50 Km. Kondisi baik 91,05 Km, sedang 29,55 Km, rusak 349,90 sehingga persentase kerusakan 74,40 persen. Kondisi jalan yang rusak menjadi penghambat dalam kegiatan pariwisata. Selain itu, yang masih menjadi hambatan yaitu kualitas SDM masyarakat Desa Mondu yang terbatas dalam memahami ilmu pariwisata.

Berdasarkan uraian diatas, tentunya pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Wisata Mondu yang seluruhnya dikelola oleh rakyat diawali dari keterlibatannya dalam pelatihan atau pelayanan wisata serta atraksi wisata. Oleh Karena itu, harus dilakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang di lakukan oleh pihak-pihak terkait seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan guna dalam menunjang kegiatan pengembangan Desa Wisata yang melibatkan masyarakat lokal yang mampu menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara dengan mempersembahkan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang ada.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, dimana salah satunya yaitu melalui program Desa Wisata di Desa Mondu yang di lakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur. Namun, dalam usaha untuk memberdayakan masyarakat di Desa Mondu tersebut terdapat beberapa permasalahan yang ada yaitu yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang belum maksimal seperti minimnya jumlah penginapan, jalan yang baik dan rumah makan. Menurut Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumba Timur dalam wawancara di media Times Indonesia pada tahun 2020 jalan Desa pada tahun 2020 yang terdapat dalam SK Bupati yang ditetapkan dengan panjang darat 470,50 Km. Kondisi baik 91,05 Km, sedang 29,55 Km, rusak 349,90 sehingga persentase kerusakan 74,40 persen. Kondisi jalan yang rusak menjadi penghambat dalam kegiatan pariwisata. Selain itu, yang masih menjadi hambatan lainnya dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Mondu yaitu kualitas Sumber daya manusia masyarakat yang terbatas dalam memahami ilmu pariwisata.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, sebagai acuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata di Desa Mondu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Penelitian Wahyuningsih dan Pradana yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lonta Sewu (Wahyuningsih & Pradana, 2021), menemukan bahwa Masyarakat Desa Hendrosari mempunyai peran penting untuk melestarikan dan mengembangkan potensi yang ada seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sehingga

mereka memiliki peran penting dalam tindakan pengambilan keputusan, mempengaruhi serta memberi manfaat bagi kondisi lingkungan yang ada disekitar. Pengelolaan yang baik menghasilkan tempat wisata yang dikenal dengan nama lontar sewu. Dengan adanya tempat wisata baru tersebut menghasilkan banyak pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata lontar sewu.

Penelitian Rahmatillah, dkk yang berjudul Studi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Wisata Alam dan Budaya sebagai Media Promosi Desa Sangiang (Rahmatillah et al., 2019), menemukan bahwa strategi yang dapat dilakukan dalam mengembangkan Desa Wisata Sangiang yaitu peningkatan kualitas pelayanan sarana prasarana, menjaga dan melestarikan potensi wisata, meningkatkan promosi wisata, dan mengemas seluruh potensi wisata menjadi kesatuan paket wisata.

Penelitian Chaerunissa dan Yunningsih yang berjudul Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang (Chaerunissa & Yuniningsih, 2020), menemukan bahwa pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo belum optimal, masih ada yang perlu di perbaiki dari masing-masing komponen tersebut.

Penelitian Rahmanda yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi di Desa Cempaka Kecamatan Bimijawa Kabupaten Tegal) (Hasdiana, 2018), menemukan bahwa pemerintah, masyarakat dan swasta sektor ini telah berupaya untuk memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan di Desa Wisata Cempaka. Masing-masing aktor mempunyai peran penting dalam pemberdayaan proses di Desa Wisata Cempaka.

Penelitian Istiyanti yang *Community Empowerment Through Development of Tourist Villages in Sukawening Village* (Istiyanti, 2020), menemukan bahwa beberapa kegiatan di desa dapat menunjang berkembangnya desa wisata di Desa Sukawening antara lain peternakan kelinci, budidaya edamame, industri sepatu sandal, dan kegiatan kebudayaan yang dikelola oleh tim Sarapala. Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Program-program yang telah dilakukan berupa sosialisasi pengembangan desa wisata yang meliputi sosialisasi mengenai pemasaran, air dan kesehatan, inventarisasi potensi desa dalam rangka rencana tata ruang desa, dan pelatihan pembuatan biodiesel serta sabun dari minyak jelantah. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata memberikan implikasi terhadap ketahanan budaya wilayah berupa penguatan budaya khususnya panahan dan beberapa perubahan pada tata nilai sosial serta lingkungan.

Penelitian Aly yang berjudul *Community Empowerment Through Village Tourism Assistance Programs In Bejjong Mojokerto* (Aly et al., 2020), menunjukkan bahwa kegiatan ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kompetensi warga mengalami peningkatan kearah yang lebih baik. Hasil kegiatan ini diukur dilakukan dengan menggunakan kuesioner (pre tes dan pos tes) dan dihitung dengan skala likert.

Penelitian Prihastha dan Suswanta yang berjudul Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Kaki Langit Padukuhan Mangunan (Prihastha & Suswanta, 2020), menemukan bahwa pariwisata lokal melalui pengembangan desa wisata dengan pemberdayaan masyarakat mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Penelitian Putri dan Suminar yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Pada Desa Wisata “Kampung Kokolaka” Kelurahan Jatirejo Kota Semarang (Putri & Suminar, 2023), menemukan bahwa proses pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal di Kampung Kokolaka dilakukan melalui tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, tahap transformasi kemampuan dan kecakapan, serta tahap pengayaan/kemampuan intelektual. Faktor pendukung yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di Kampung Kokolaka meliputi kesadaran dan semangat dari masyarakat, serta motivasi yang diberikan oleh berbagai pihak. Sedangkan faktor penghambatnya berupa belum konsistennya semangat masyarakat, perbedaan pendapat, dan komitmen dalam

mengembangkan desa wisata. Strategi yang dilakukan dalam menangani hambatan berupa musyawarah bersama dan peninjauan kegiatan secara rutin. Pemberdayaan masyarakat di Kampung Kokolaka membawa dampak positif dalam menunjang kesejahteraan masyarakat lokal.

Penelitian Kusumaningsih yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Di Desa Wisata Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes) (Kusumaningsih, 2022), menemukan bahwa kelompok sadar wisata dan unsur masyarakat mampu mengembangkan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan pengembangan desa wisata yang dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk langkah stimulant merubah kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes.

Penelitian Laraswati, dkk yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokdarwis Untuk Mengembangkan Desa Wisata Sumberbulu Di Desa Pendem Mojogedang Karanganyar (Laraswati et al., 2020), menemukan bahwa peran Pokdarwis melalui pemberdayaan masyarakat terlaksana melalui berbagai sosialisasi dan penyuluhan, berbagai diskusi, pemberian informasi, motivasi dan penyelenggaraan kegiatan dan pelatihan di bidang pariwisata. Pemberdayaan masyarakat dilakukan di beberapa tahapan yaitu perencanaan dimana Pokdarwis merupakan wadah masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan gagasan, pengorganisasian oleh Pokdarwis yang melibatkan seluruh masyarakat dalam kegiatan dan pengelolaan pariwisata desa, pelaksanaannya melibatkan masyarakat sebagai sumber daya utama dalam pelaksanaannya kegiatan, dan evaluasi.

Penelitian Arcana, dkk yang berjudul Tata Kelola Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal di Desa Tihingan Kabupaten Klungklung (Arcana et al., 2021), menemukan bahwa melalui pelatihan tata kelola desa wisata berbasis kearifan lokal, masyarakat dan desa dapat saling bersinergi serta lebih peduli terhadap kelangsungan alam serta lingkungan yang menjadi aset utama dalam usaha pengembangan desa wisata Tihingan.

Penelitian Setiadi dan Pradana yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Genilangit di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan (Setiadi & Pradana, 2022), menemukan bahwa dalam proses pembentukannya desa wisata ini mengalami berbagai permasalahan, salah satunya adalah perubahan nama Taman Wisata Bedengan menjadi Taman Wisata Genilangit. Perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa merupakan target pembangunan yang utama, kemampuan untuk berkembang secara mandiri akan muncul jika partisipasi masyarakat mulai digalakkan dalam membangun desa. Hal ini dapat diterapkan salah satunya dengan cara keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan dan turut terlibat untuk mensukseskan program pembangunan yang ada didesanya. tetapi lebih dari sekedar itu karang taruna harus secara totalitas dalam menyelenggarakan kegiatan desa wisata ini sehingga harus sesuai dengan apa yang direncanakan, yang perlu ditekankan adalah proses pembangunan desa berjalan atas inisiatif dan diprakarsai warga setempat dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki.

Penelitian Rahmawati, dkk yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung (Rahmawati et al., 2022), menemukan bahwa . Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah memberikan pelatihan awal kepada masyarakat setempat dengan membangun pemahaman mengenai pariwisata dan desa wisata serta pengelolaannya.

Penelitian Sari dan Pinasti yang berjudul Strategi Pokdarwis Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wisata Giyanti, Wonosobo)(Sari & Pinasti, 2023), menemukan bahwa dalam pemberdayaan di Dusun Giyanti melalui Desa Wisata Giyanti, Pokdarwis melakukan beberapa upaya yaitu: Pokdarwis meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memaksimalkan sumber daya melalui pelatihan-pelatihan. Pokdarwis juga menerapkan strategi

dalam melaksanakan program pemberdayaan, yaitu (1) Memberikan motivasi pada masyarakat berupa pembentukan kelompok-kelompok kesenian dan kerajinan (2) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan (3) Manajemen diri (4) Mobilisasi sumber daya (5) Pembangunan dan pengembangan jejaring.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata dimana fokusnya memang hanya pada pelaksanaan prinsip-prinsip pemberdayaannya, sedangkan pada penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada alasan dilakukannya pemberdayaan. Selain itu pada penelitian-penelitian sebelumnya tidak banyak yang menggunakan teori pemberdayaan, lebih kepada teori strategi dan juga teori analisis.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Wisata di Desa Mondu Kecamatan Katanang Kabupaten Sumba Timur. Selain itu juga, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat serta upaya untuk mengatasi faktor penghambat yang ada.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Sugiyono mengungkapkan dalam pendekatan kualitatif pada tahap awal masalah yang akan diteliti belum terlalu jelas dan pasti sehingga instrumen utama yang digunakan adalah peneliti sendiri. Setelah masalah yang akan diteliti menjadi lebih jelas, kemungkinan instrumen penelitian sederhana dapat dikembangkan (Sugiyono, 2015). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori Pemberdayaan dari Najiyati, yang mengatakan bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka harus memperhatikan prinsip – prinsip pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 4, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip partisipasi, prinsip keswadayaan dan prinsip keberlanjutan (Najiyati et al., 2014). Selain itu, pada penelitian ini terdapat 17 informan yang di wawancarai untuk memperoleh informasi secara lebih mendalam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini peneliti membahas bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata di Desa Mondu, kemudian melihat dari faktor-faktor penghambat yang ada dalam pemberdayaan masyarakat serta melihat upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mengatasi hambatan yang di temukan atau yang ada dalam pemberdayaan masyarakat.

2.1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Desa Mondu Kecamatan Katanang Kabupaten Sumba Timur

Potensi wisata yang ditawarkan oleh Desa Mondu adalah potensi alam dengan destinasi wisata yang masih asri serta struktur wilayah yang unik serta potensi budayanya yang dimana Desa Mondu ini masih mempertahankan adat istiadat Sumba. Desa budaya Sumba ini sepenuhnya di kelola oleh masyarakat dan sebagai aktivitas di dalam sebuah pariwisata yang memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat perlu

dilakukan guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pengembangan Desa Wisata Mondu.

2.1.1. Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan menegaskan pada pentingnya menciptakan lingkungan yang adil dan setara bagi masyarakat dalam upaya pemberdayaan. Prinsip ini mengacu pada keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumber daya, peluang, dan hak yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat sudah sepatutnya masyarakat diberikan hak yang ada secara adil. Desa wisata merupakan program dalam meningkatkan potensi wisata baik itu alam, budaya maupun potensi lainnya yang terdapat pada desa tersebut. Program ini juga harus memperhatikan masyarakat lokal yang ada dengan melakukan peningkatan kualitas pada masyarakat sehingga perlu adanya proses pemberdayaan masyarakat untuk menunjang program desa wisata hal ini juga dikarenakan masyarakat lokal bukan hanya objek dari program ini tetapi subjek yang langsung berperan dalam kegiatan wisata.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkomitmen dalam menjamin hak-hak masyarakat dalam kegiatan pariwisata yang ada di Desa Mondu dan sekaligus mengelola objek-objek wisata yang ada di desa. Pemerintah tidak mengintervensi kearifan lokal dan budaya yang ada di masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat. Namun, hal tersebut dijadikan salah satu daya tarik potensi wisata budaya yang dapat mendatangkan wisatawan. Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Sumba Timur juga memberikan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dan bantuan dari pemerintah dalam peningkatan kualitas kegiatan pariwisata di Desa Mondu. Pemerintah memberikan bantuan rumah bersama untuk menjual hasil dan olahan makanan lokal, kerajinan tangan dan juga kain tenun. Namun masyarakat juga harus melaksanakan kewajiban mereka dalam melestarikan dan merawat objek wisata yang ada di Desa Mondu. Jadi, hak masyarakat diupayakan untuk terpenuhi tetapi juga masyarakat harus melaksanakan kewajiban mereka.

Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) juga berpartisipasi aktif dalam rangka meningkatkan perkembangan wisata desa Mondu. Partisipasi POKDARWIS dalam rangka memberdayakan masyarakat desa, menyediakan fasilitas penunjang berupa plang desa wisata Mondu, merenovasi jalan menuju tempat wisata, dan penyediaan tempat sampah di sekitar desa wisata. POKDARWIS juga berpartisipasi dalam memberikan informasi program pemerintah terkait desa wisata Mondu dengan tujuan masyarakat dapat terpengaruh dalam hal melestarikan objek wisata sekaligus meningkatkan perkembangan desa wisata Mondu. Masyarakat disekitar desa wisata Mondu akan mendapatkan program pelatihan jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kunjungan desa wisata Mondu. Masyarakat di sekitar desa wisata Mondu mendapatkan dampak positif dari adanya desa wisata ini berupa perubahan akan ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai prinsip kesetaraan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Desa Mondu Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur dapat disimpulkan bahwa terdapat keadilan antara hak dan kewajiban dalam pengembangan desa wisata Mondu dan pemberdayaan masyarakat. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur melakukan upaya pemberdayaan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memenuhi hak yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk mendapatkan informasi dan layanan yang adil oleh pemerintah. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan berhasil diterapkan dengan cukup baik dalam pelaksanaan program desa wisata di Desa Mondu.

2.1.2. Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi dalam teori pemberdayaan masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif dan nyata dari masyarakat dalam proses pemberdayaan. Partisipasi ini tidak hanya mencakup keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program, tetapi juga dalam pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Prinsip partisipasi menegaskan bahwa masyarakat merupakan pihak yang memiliki hak untuk memperoleh informasi dan terlibat dalam segala aspek program pemberdayaan. Dalam konteks ini, masyarakat dianggap sebagai subjek bukan objek, yang memiliki kemampuan untuk memahami dan mengevaluasi situasi mereka, serta memberikan kontribusi pada proses pemberdayaan.

Meningkatkan kualitas desa wisata Mondu dibutuhkan partisipasi masyarakat yang didukung oleh program yang diberikan oleh dinas dengan harapan agar partisipasi masyarakat bisa meningkat dan program dapat berjalan dengan efektif dan memiliki nilai guna yang maksimal. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur berkata bahwa ada kebijakan dan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program desa wisata Mondu, seperti memperluas sosialisasi program, menjamin transparansi, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Masyarakat dapat menyumbangkan idenya dalam forum rapat yang akan menjadi pertimbangan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus memastikan bahwa seluruh program dijalankan dengan benar dan bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sebagai pelaku pariwisata .

Dalam prinsip partisipasi, masyarakat harus terlibat dalam sebuah proses perencanaan pembangunan yang ada. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan. Masyarakat dapat menyampaikan masukan kepada pemerintah untuk kemudian dapat dipertimbangkan. Namun, terdapat kendala yang dimana sebagian besar masyarakat belum sadar untuk terlibat. Prinsip partisipasi juga harus memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata dan selalu mendukung proses pembangunan yang ada. Pemerintah dalam hal ini dinas mendukung program desa wisata dengan memfasilitasi kios oleh-oleh, memberikan pelatihan jasa tour guide, jasa boga, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa partisipasi masyarakat Desa Mondu Kabupaten Sumba Timur dalam program Desa Wisata sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari keterlibatan aktif masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program Desa Wisata, sehingga dapat disimpulkan bahwa program Desa Wisata memberikan dampak yang baik dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka serta mendukung kegiatan pariwisata walaupun belum maksimal dikarenakan anggaran yang terbatas. Dengan berpartisipasi dalam program Desa Wisata, masyarakat dapat memperkuat peran serta tanggung jawab mereka dalam mengelola dan melestarikan objek wisata yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat Desa Mondu.

2.1.3. Prinsip Keswadayaan

Prinsip keswadayaan adalah kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk menjadi mandiri dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Masyarakat diharapkan mampu memimpin dan menjalankan proses pemberdayaan secara mandiri dengan dukungan dan fasilitasi dari luar. Prinsip ini mendorong masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam menentukan kebijakan dan mempengaruhi perubahan lingkungan mereka. Pelatihan dan pembelajaran diberikan untuk memperkuat kemampuan dan kapasitas masyarakat secara mandiri. Prinsip keswadayaan menuntut pengelolaan

sumber daya yang efektif dan efisien, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengelolaan sumber daya tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang dihadapi.

Dinas Pariwisata melakukan peran sebagai fasilitator dan pembina dalam peningkatan kemandirian masyarakat dengan memberikan fasilitas dan dukungan masyarakat pada pelatihan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Di Desa Mondu, Dinas Pariwisata memberikan bantuan pendidikan dan pelatihan keterampilan, hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai prinsip dalam meningkatkan kemampuan kemandirian masyarakat. Langkah pemerintah yang dilakukan adalah pelatihan sumber daya manusia dan kompetensi pelaku wisata dan industri wisata. Dari program ini belum berjalan dengan maksimal dikarenakan anggaran yang terbatas dan diharapkan adanya pendampingan dari LSM dan juga kerja sama pihak swasta. Dengan terbatasnya anggaran, Dinas Pariwisata tetap mendorong masyarakat tetap berkreativitas dan menghasilkan produk yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap program Desa Wisata Mondu mengenai prinsip keswadayaan yaitu program Desa wisata membantu meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat di Desa Mondu dengan bantuan pendampingan pelatihan baik itu dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur maupun dari pihak swasta. Pemerintah juga memberikan bantuan pendidikan agar masyarakat bisa menambah pengetahuan masyarakat. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur membantu meningkatkan kelompok usaha masyarakat dalam memberi bantuan pendampingan dalam pembuatan kemasan produk manggulu. Peningkatan kemandirian usaha masyarakat dapat membawa dampak positif seperti peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kontribusi ekonomi. Dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, mereka dapat menghasilkan pendapatan sendiri tanpa tergantung pada bantuan.

2.1.4. Prinsip Keberlanjutan

Prinsip berkelanjutan menekankan pentingnya menjalankan program pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada pembangunan yang berkelanjutan. Upaya harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan agar program pemberdayaan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan serta kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses yang berkelanjutan, terus-menerus, dan tidak terputus-putus. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang hanya terfokus pada program pembangunan yang memiliki batasan waktu dan dana tidak memperhatikan kelanjutannya setelah program selesai.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur, dalam melaksanakan program Desa Wisata Mondu mengharapkan adanya kerja sama dalam pembangunan yang berkelanjutan. Adapun upaya yang dilakukan yaitu membuat rencana pelatihan yang berkelanjutan dan bertahap. Dengan terbatasnya anggaran maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ingin pihak swasta untuk melakukan investasi dalam pengembangan objek wisata. Selain itu, untuk memastikan program berjalan dengan baik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan monitoring dan evaluasi untuk memperbaiki dan mengatasi kendala yang menghambat proses pemberdayaan.

Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur berupaya menyiapkan strategi untuk pengembangan Desa Wisata Mondu agar status Desa Wisata Rintisan menjadi Desa Wisata berkembang. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur juga menekankan dalam pengelolaan objek wisata harus memperhatikan kelestarian dan keberlangsungan sumber daya alam di Desa Mondu. Program pelatihan dan pendampingan masyarakat juga menjadi pelayanan yang diberikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur dalam meningkatkan kemampuan masyarakat. Desa Wisata yang ada di Kabupaten Sumba Timur berjumlah sebanyak 8 desa wisata yang ditetapkan melalui SK Bupati Sumba Timur. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur

membagi menjadi tiga destinasi wisata yaitu desa wisata bahari, desa wisata alam, dan desa wisata budaya. Desa Mondu termasuk desa wisata budaya dengan destinasi yang tersedia yaitu: Kampung Tradisional Prainatang, Proses Pembuatan Tenun Ikat Kanatang di Kampung Mondu, Air Terjun Tanggedu, Padang Sabana Kampung Mondu (Fotografi, *Pre-weed*, dan *Horse Ridding*).

Program pengembangan desa wisata mondu oleh pemerintah pusat dilakukan dengan cara memfasilitasi anggaran dalam hal festival maupun program pelatihan yang disediakan oleh pemerintah untuk desa wisata Mondu. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyalurkan dana untuk desa wisata Mondu. Sedangkan program pelatihan sebagai contoh Pelatihan *Guilding and Hospitality* difasilitasi oleh Kemenparekraf melalui Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Desa wisata Mondu difasilitasi oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif atas keindahan yang dimiliki seperti pesona air terjun, kerajinan tenun ikat, serta tradisi budaya pemakaman yang dapat disaksikan di waktu-waktu tertentu. Kemenparekraf juga ikut memfasilitasi pelatihan jasa pengelolaan desa wisata Mondu yang diberikan melalui Lembaga Sertifikasi Kompetensi.

Pada tahun 2019, Blue Carbon Consortium (BCC) atas dukungan MCA-Indonesia memberikan Program Pengelolaan Pengetahuan Tata Kelola Sumberdaya Pesisir Rendah Emisi di Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya untuk desa Mondu diadakan kegiatan pelatihan “Pembuatan Paket Ekowisata POKDARWIS Prai Liangu - Desa Mondu, Kec. Kanatang, Kab. Sumba Timur” di Aula Kantor Desa Mondu, yang diikuti oleh sekitar 45 peserta dari unsur Pokdarwis, aparat desa dan tim BCC sendiri pada tanggal 22-23 Februari 2019. Adanya pelatihan yang diberikan oleh tim Blue Carbon Consortium (BCC) mengenai paket wisata yang dapat dikelola oleh masyarakat desa Mondu memberikan dampak positif terhadap antusiasme masyarakat dalam mengelola desa wisata Mondu. Melalui interaksi dalam kelas pelatihan ini telah terlihat bahwa warga Mondu sendiri mau belajar untuk melihat segala sesuatu tidak dari kacamata sendiri tetapi dari kacamata pendatang/ wisatawan. Selain menjadikan desa wisata Mondu sebagai tempat wisata yang dapat dikunjungi, desa wisata ini juga dimanfaatkan sebagai akses untuk melestarikan adat istiadat/kearifan lokal yang ada melalui experience yang dirasakan pengunjung saat berwisata.

Program selanjutnya yaitu pembuatan video objek wisata Mondu yang disebarluaskan melalui youtube sehingga objek wisata di Desa Mondu dapat dikenal secara luas oleh masyarakat di Indonesia dan di luar negeri dengan menggunakan metode ADDIE (Analisis, Desain, Pengembangan, Implementasi, Evaluasi). Program yang terakhir yaitu Program pengenalan media sosial kepada pengrajin tenun ikat agar para pengrajin tenun ikat dapat memiliki akun media sosial untuk memasarkan produk tenun ikat secara online yang mana biasanya para pengrajin tenun hanya menunggu orang yang datang untuk membeli tanpa melakukan promosi di media sosial. Materi yang disampaikan adalah pengenalan media sosial seperti facebook, instagram, tiktok dan marketplace yakni shopee; manfaat media sosial bagi pemasaran.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti bahwa penerapan prinsip berkelanjutan pada program Desa Wisata Mondu memiliki dampak positif bagi pemberdayaan masyarakat, antara lain meningkatkan kemampuan Masyarakat dengan program sertifikasi keahlian bidang pariwisata, adanya pelatihan dan pendampingan masyarakat desa dan bantuan- bantuan dari pemerintah maupun swasta. Melalui program Desa Wisata, masyarakat lebih bergerak maju untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan usaha mandiri dalam memenuhi kebutuhan keluarga secara berkelanjutan.

2.2. Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata di Desa Mondu Kecamatan Katanang Kabupaten Sumba Timur

Program Desa Wisata Mondu diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala yang membuat beberapa proses pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat terganggu. Peneliti menemukan beberapa masalah dalam pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata yang bisa menghambat proses pemberdayaan. Oleh karena itu, dilakukan identifikasi faktor penghambat pemberdayaan masyarakat dalam program desa wisata. Berikut faktor penghambat pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sumba Timur dalam program Desa Wisata Mondu, yaitu :

2.2.1. Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat perlu dilakukan karena berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam mengekspresikan kreativitas dan inovasi serta pengembangan wawasannya melalui kualitas pendidikan. Pada umumnya tingkat pendidikan di Kawasan Desa Wisata Mondu masih rendah. Kebanyakan dari mereka menyelesaikan pendidikan hanya sampai ke tingkat SD ataupun SMP, dikarenakan waktu mereka dihabiskan untuk membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Tingkat pendidikan di desa Mondu masih rendah dengan mayoritas ratusan yang hanya tamat SD dan SMP bahkan banyak yang tidak bersekolah, sedangkan yang mencapai gelar Diploma dan Sarjana hanya berjumlah 30-an orang yang artinya, kualitas sumber daya manusia Desa Mondu masih sangat rendah. Ada berbagai faktor mempengaruhi masyarakat dalam mendapatkan pendidikan seperti masalah ekonomi dan juga fasilitas sekolah yang terbatas. Kapasitas masyarakat dalam mengelola objek wisata juga masih belum optimal sehingga masih diperlukan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat.

2.2.2. Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah pengembangan desa wisata Mondu ini. Jika suatu program ingin berjalan dengan baik, maka anggarannya pun harus direncanakan terlebih dahulu dengan sangat baik dan matang agar program tersebut tidak gagal. Anggaran yang diberikan pemerintah daerah untuk pengembangan Desa Wisata Mondu sangat terbatas. Keterbatasan anggaran ini membuat program menjadi belum optimal sehingga pembangunan dan pemberdayaan yang ada menjadi belum maksimal sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Kemudian adanya anggaran yang difokuskan pasca bencana Covid-19 dan juga bencana Seroja yang membuat anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengalami pemotongan dana. Oleh sebab itu banyak program yang dianggarkan belum bisa berjalan dalam pengembangan desa wisata Mondu.

2.2.3. Keterbatasan Infrastruktur Pariwisata

Infrastruktur merupakan fasilitas penunjang yang dibutuhkan oleh wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata. Infrastruktur juga merupakan sumber daya alam yang ada di tempat wisata melainkan juga sumber daya buatan manusia dalam mempermudah akses dan menjamin kenyamanan pengunjung saat melakukan kegiatan pariwisata. Wisatawan membutuhkan sarana dan prasarana yang baik dan bagus ketika memilih tempat wisata yang akan dikunjunginya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur mengakui bahwa fasilitas dalam mendukung kegiatan wisata yang ada di Desa Mondu masih kurang. Jumlah fasilitas seperti tempat makan, penginapan dan jalan yang memiliki kualitas yang kurang baik. Berbagai fasilitas juga yang

peneliti melihat dilapangan bahwa tempat parkir yang kurang tertata rapi yang membuat wisatawan sulit dalam mobilisasi keluar masuk objek wisata.

2.3. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Desa Mondu Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur

Dalam rangka untuk mengatasi faktor penghambat pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata Desa Mondu Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur. Peneliti melihat perlu adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan atau hambatan .

2.3.1. Upaya yang dapat dilakukan untuk Mengatasi Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kurang

Dalam mengatasi hambatan yang ada dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Mondu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Timur melakukan berbagai upaya agar pemberdayaan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan semestinya. Dari hasil wawancara peneliti lakukan terdapat beberapa upaya antara lain:

1. Pelatihan

Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam melaksanakan proses pemberdayaan yaitu menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dan pendampingan masyarakat yang telah dilakukan. Dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten sumba Timur melakukan berbagai pelatihan dan pendampingan masyarakat. Hal ini dilakukan dalam upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas masyarakat serta menambah pengetahuan mengenai bidang-bidang tertentu seperti pemandu wisata, jasa boga dan lain-lain. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur juga melakukan dorongan dan mengajak pihak swasta berperan dalam pengembangan Desa Wisata Mondu.

2. Pendidikan

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur dalam mengatasi hambatan terkait kurangnya sumber daya manusia yang kurang yaitu memberikan bantuan beasiswa pendidikan untuk anak SMK yang ada di Desa Mondu. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur berupaya dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Desa mondu yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang bagus dibuktikan dengan jumlah sekolah yang sangat terbatas sehingga masyarakat belum mendapat pendidikan yang layak. Oleh karena itu, Pemerintah daerah memberikan beasiswa kepada anak yang melanjutkan sekolah ke tingkat SLTA.

2.3.2. Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Keterbatasan Anggaran

Anggaran adalah hal yang menjadi fundamental dalam menjalankan sebuah program pemerintah. Ketersediaan anggaran yang cukup dapat mempermudah dan melancarkan kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya di Desa Mondu oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur. Keterbatasan anggaran dikarenakan pemulihan bencana pasca Covid-19 dan bencana seroja mengakibatkan anggaran difokuskan untuk menangani masalah tersebut. Terlebih lagi pendapatan asli daerah yang rendah yang membuat pelaksanaan pemberdayaan menjadi terbatas.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur dalam mengatasi keterbatasan anggaran adalah dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta

melakukan kerja sama dengan bank pembangunan daerah (Bank NTT), Lembaga swadaya Masyarakat serta relawan dalam membantu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

2.3.3. Upaya yang dilakukan dalam Mengatasi Keterbatasan Fasilitas

Fasilitas merupakan unsur pendukung dalam mempermudah kegiatan wisata . Fasilitas yang memadai dapat menjadi daya tarik serta membuat wisatawan menjadi aman dan nyaman dalam melakukan perjalanan pariwisata. Desa Mondu belum memiliki fasilitas yang baik dan bagus seperti jalan yang rusak, jumlah penginapan dan restoran yang terbatas dan lain-lain. Adanya keterbatasan dan kekurangan akan fasilitas yang membuat pemerintah melakukan upaya dalam mengatasi keterbatasan fasilitas tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur adalah dengan membangun rumah pusat oleh-oleh. Tempat ini sebagai wadah bagi masyarakat lokal dalam menjual berbagai produk yang masyarakat buat seperti kain tenun, makanan ringan dan lain-lain. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur juga berupaya bekerja sama dengan bank NTT dan pokdarwis dalam menyediakan fasilitas umum seperti wc di beberapa objek wisata.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pemberdayaan masyarakat di Desa Mondu melalui program desa wisata selain dilihat bagaimana pemberdayaannya, tetapi juga dilihat dari faktor penghambat dan upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Pemberdayaan masyarakat Desa Mondu melalui program Desa Wisata yaitu salah satunya Kelompok Sadar Wisata Kakaruk Loku melakukan pembinaan dan pendampingan dengan bekerja sama dengan pemerintah dan swasta dalam melakukan pelatihan pembuatan kemasan produk makanan Manggulu dan juga pembinaan terhadap pengrajin tenun Sumba. Hal ini sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang juga melihat dari kedua sisi tersebut. Salah satu contohnya yaitu penelitian Rahmanda (Hasdiana, 2018), yang menemukan bahwa pemerintah, masyarakat dan swasta sektor ini telah berupaya untuk memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan di Desa Wisata Cempaka. Masing-masing aktor mempunyai peran penting dalam pemberdayaan proses di Desa Wisata Cempaka. Sebagai contoh, pembinaan pokdarwis Desa Cempaka yang melakukan pelatihan kerajinan bambu, pembuatan sablon, pelatihan pembuatan soevenir dan juga marketing. Akan tetapi selain persamaan yang ada pada penelitian sebelumnya, juga terdapat perbedaan yang ada pada penelitian-penelitian sebelumnya dimana salah satunya yaitu penelitian dari Rahmatillah, dimana pada penelitian ini menggunakan teori strategi selain strategi pemberdayaan (Rahmatillah et al., 2019).

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Desa Mondu Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur dapat dilihat melalui prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Penelitian mengenai prinsip kesetaraan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur menunjukkan bahwa terdapat keadilan antara hak dan kewajiban dalam pengembangan desa wisata Mondu dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian pada prinsip partisipasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Mondu, Kabupaten Sumba Timur dalam program Desa Wisata sudah cukup baik. Penelitian pada prinsip kewaspadaan terhadap program Desa Wisata Mondu menunjukkan bahwa prinsip keswadayaan diterapkan dengan baik, membantu meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat di Desa Mondu. Dan terakhir penerapan prinsip berkelanjutan pada program Desa Wisata Mondu memiliki dampak positif bagi pemberdayaan masyarakat, antara lain

meningkatkan kemampuan masyarakat, adanya pelatihan dan pendampingan masyarakat desa dan bantuan-bantuan dari pemerintah maupun swasta.

Kemudian hambatan dalam pemberdayaan masyarakat yang ditemukan antara lain : Sumber Daya Manusia yang kurang, Keterbatasan Anggaran dan Keterbatasan Infrastruktur. Dengan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan ini yaitu : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur melakukan berbagai pelatihan dan pendampingan masyarakat, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta melakukan kerja sama dengan bank pembangunan daerah (Bank NTT), Lembaga swadaya Masyarakat serta relawan dalam membantu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, dan membangun rumah pusat oleh-oleh.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian, dimana penelitian ini hanya dilakukan selama dua minggu dan hanya berfokus pada satu dinas sehingga dalam memperoleh data dan informasi peneliti merasa tidak memiliki waktu yang cukup.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa masalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat adalah hal yang harus terus ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri, untuk itu penulis berharap pemerintah dan masyarakat dapat terus mengusahakan berbagai cara untuk dapat terus meningkatkan sarana dan prasarana serta aktivitas atau kegiatan yang menunjang proses pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga, penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan secara berkala terkait dengan pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat diperoleh aspek-aspek apa saja yang harus dibenahi dalam proses pemberdayaan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aly, M. N., Suharto, B., Nurhidayati, S. E., Nuruddin, N., & Triwastuti, R. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pendampingan Desa Wisata Di Desa Bejijong Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, 4(2), 390. <https://doi.org/10.20473/jlm.v4i2.2020.390-399>
- Arcana, K. T. P., Pranatayana, I. B. G., Suprpto, N. A., Sutiarmo, M. A., Semara, I. M. T., Candrawati, N. L. P. A., & Suri, M. (2021). Tata Kelola Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal di Desa Tihingan Kabupaten Klungklung. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 1(1), 36–45. <https://doi.org/10.22334/jam.v1i1.5>
- Chaerunissa, S. F., & Yuniningsih, T. (2020). Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonopolo Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 9(4), 159–175.
- Hasdiana, U. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi di Desa Cempaka Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal). *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Istiyanti, D. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa

- Sukawening (Community Empowerment Through Development of Tourist Villages in Sukawening Village). *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 2(1), 53–62.
- Kusumaningsih, O. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Di Desa Wisata Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes). *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(01), 1–6.
- Laraswati, Pradipta, M. P. Y., & Wahyuningsih, H. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokdarwis untuk Mengembangkan Desa Wisata Sumberbulu di Desa Pendem Mojogedang Karanganyar. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 16(1), 58–69. <https://jurnal.stpsahidsurakarta.ac.id/index.php/JPI/article/view/175/121>
- Najiyati, Asmana, & Suryadiputra. (2014). "Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambuy." www.wetlands.or.id
- Prihastha, A. K., & Suswanta, S. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Kaki Langit Padukuhan Mangunan. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 7(2012), 221. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2020.v07.i01.p10>
- Putri, D. P., & Suminar, T. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Pada Desa Wisata "Kampung Kokolaka" Kelurahan Jatirejo Kota Semarang. *Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 3(2), 1–11.
- Rahmatillah, T. P., Insyah, O., Nurafifah, N., & Hirsan, F. P. (2019). Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Wisata Alam dan Budaya Sebagai Media Promosi Desa Sangiang. *Jurnal Planoeath*, 4(2), 111. <https://doi.org/10.31764/jpe.v4i2.970>
- Rahmawati, D., Handayani, R. D., & Rahmayani, R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. *Jurnal Sosial & Abdimas*, 4(2), 74–82.
- Sari, I. W., & Pinasti, V. I. S. (2023). Strategi Pokdarwis Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wisata Giyanti, Wonosobo). *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 11(2), 84–95. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v11i2.59271>
- Setiadi, M. B., & Pradana, G. W. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Genilangit (Studi Di Desa Wisata Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan). *Publika*, 881–894. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p881-894>
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif (XI)*. CV. AIFABETA.
- Wahyuningsih, R., & Pradana, G. W. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu. *Publika*, 323–334. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p323-334>